

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian bab ini, akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian terkait Konstruksi Makna Populisme Politik Dan Tingkat Elektabilitas Partai Politik dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam dua bagian simpulan, yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Pada kesimpulan umum dideskripsikan hasil penelitian secara general sehingga tidak disusun secara kategorisasi sebagaimana pada rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pada kesimpulan khusus akan dideskripsikan hasil penelitian secara spesifik dengan adanya kategorisasi yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut kesimpulan yang dihasilkan:

#### 5.1 Simpulan

Fenomena populisme merupakan fenomena yang seringkali terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Populisme politik di Indonesia dianggap sebagai strategi politik dalam meningkatkan elektabilitas partai dalam pemilihan umum. Baik populisme menjadi cara membangun kedekatan para politisi bersama rakyat, maupun menjadi cara dalam membangun popularitas, dan bahkan seringkali populisme politik dijadikan sebagai cara untuk memanipulasi emosi massa untuk menentang kelompok lain demi kepentingan politik belaka. Misalnya menekankan pemisahan antara "*rakyat*" dan "*elit*" serta membangun narasi mewakili kepentingan rakyat. Padahal secara tidak langsung partai dan politisi bagian dari elit. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas partai politik, di sisi lain, adanya upaya untuk membangun popularitas untuk mencari peluang kemenangan dalam pemilihan partai politik tersebut.

Ketika makna populisme politik dikonstruksikan dan dikomunikasikan secara efektif oleh partai politik, hal ini dapat meningkatkan tingkat elektabilitas partai politik tersebut. Melalui narasi yang dibangun oleh partai politik melalui strategi populisme politik maka secara tidak langsung masyarakat yang merasa aspirasi mereka diwakili oleh partai politik cenderung mendukung dan memilih partai tersebut dalam pemilihan umum. Dari bangunan konstruksi makna populisme politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera

memiliki pengaruh yang efektif terhadap peningkatan elektabilitas partai politik. Oleh sebab itu, penting bagi partai politik dalam memahami dinamika untuk beradaptasi dengan baik dalam membangun strategi komunikasi politik mereka sebagai tujuan untuk memperoleh dukungan elektoral yang lebih tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya dalam mendidik warga negara menjadi paham, kritis, dan demokratis dalam lingkup perkembangan politik di negara demokrasi. Sehingga menjadi warga negara yang melek politik. Karena pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana menciptakan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*). Populisme sebagai fenomena dalam politik perlu dikaji melalui pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi *civic disposition* dan *civic engagement* karena kedua dimensi ini yang berkaitan langsung dengan proses perkembangan politik. *Civic disposition* meninjau dari segi sikap warga negara dalam kehidupan demokrasi. Sementara *civic engagement* meninjau dari segi keterlibatan warga negara dalam proses politik. Pendidikan kewarganegaraan melihat populisme politik sebagai fenomena yang positif jika populisme di jadikan sebagai strategi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya menjadi narasi kosong belaka (janji politik) yang tidak di tepati oleh partai dan politisi. Selama populisme membangun narasi-narasi yang rasional dalam lensa pendidikan kewarganegaraan itu bukan menjadi masalah. Tetapi jika populisme politik menjadi strategi yang dapat memicu konflik dalam masyarakat maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut pandangan pendidikan kewarganegaraan. Maka pendidikan kewarganegaraan memberikan perspektif baru dalam melihat fenomena populisme politik.

Adapun simpulan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konstruksi makna populisme politik dalam pandangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) populisme politik dianggap sebagai strategi dalam membangun kedekatan dengan rakyat agar partai dapat di terima oleh masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pendekatan dalam membangun popularitas baik individu maupun partai, upaya membangun narasi dalam rangka untuk membawa kemenangan politik melalui cara mencerminkan ciri kharismatik seorang politisi dan akan berdampak pada tingkat elektabilitas partai

politik. Sedangkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap populisme politik sebagai strategi untuk membangun citra partai dimasyarakat, Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri menganggap populisme sebagai hal yang positif, Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai bercorak islam maka menggunakan narasi islam dalam program-program partai dimasyarakat. Kedua partai ini menganggap populisme politik sebagai hal yang positif dan dianggap sebagai strategi dalam menghadapi pemilihan umum. Artinya ideologi partai tidak mempengaruhi pandangan partai dalam memaknai populisme politik tersebut.

2. Pendekatan populisme politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggunakan, *Pertama*, pendekatan kerakyatan hal ini dapat dilihat dari jati diri partai yaitu kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. *Kedua*, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikenal sebagai partai “*wong cilik*” yang sangat dekat dengan rakyat. *Ketiga*, Narasi ini terbentuk dalam paradigma masyarakat karena narasi ini betul-betul nyata dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan Pendekatan populisme politik, *Pertama*, menggunakan pendekatan islam sebagai rahmatan lil alamiin. *Kedua*, Pendekatan keagamaan dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik. *Ketiga*, Mencerminkan latar belakang partai sebagai partai yang islamis. *Keempat*, Program yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera berorientasi pada penanaman nilai keislaman melalui dakwah dan dialog dalam bentuk forum keagamaan.
3. Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yaitu: *Pertama*, lebih menekankan strategi *pass political*. Sehingga partai ini disebut dengan istilah partai “wong cilik” atau dikenal sebagai “partai rakyat” berusaha membangun kedekatan dengan masyarakat. *Kedua*, menyebarkan kadernya untuk turun ditengah-tengah masyarakat dan menawarkan program yang berorientasi pada kesejahteraan. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera menggunakan strategi dalam memenangkan partainya melalui dua strategi yaitu: *Pertama*, strategi media (udara) menggunakan media dalam mengkampanyekan visi dan misi partai, melalui video-video singkat sebagai edukasi bagi masyarakat. *Kedua*, strategi darat (program) menyelenggarakan program-

program secara langsung bagi masyarakat baik melalui dialog, diskusi publik, dan sosialisasi, selain itu Partai Keadilan Sejahtera juga melakukan pemasangan baliho, *billboard*, pembagian stiker tujuan utamanya adalah memperoleh dukungan dari komunitas Muslim yang konservatif dan religius. Partai ini secara aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan dan memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang relevan bagi masyarakat Muslim, seperti pendidikan Islam, implementasi syariah, dan keadilan sosial.

4. Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam memandang populisme politik sebagai hal yang positif jika orientasinya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat . Populisme dilihat melalui dimensi PKn yaitu, *civic disposition* dan *civic engagement*. *Civic disposition* meninjau dari segi sikap warga negara dalam kehidupan demokrasi. Sementara *civic engagement* meninjau dari segi keterlibatan warga negara dalam proses politik menciptakan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*). Alasan Pendidikan kewarganegaraan perlu mengkaji fenomena populisme politik, yaitu: *Pertama*, untuk memberikan gambaran konkret mengenai populisme politik. *Kedua*, dapat mengarahkan tindakan populis (politisi) agar lebih berhati-hati menggunakan strategi populisme dalam kegiatan politiknya. *Ketiga*, dapat memberikan perspektif baru mengenai populisme politik dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. *Keempat*, dapat memberikan konstruksi makna populisme politik yang rasional bagi partai politik dan pelaku politik (politisi).

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah peneliti jabarkan. Maka penelitian ini memiliki implikasi secara teoritis dan praksis terhadap konstruksi makna populisme politik dan tingkat elektabilitas partai politik sebagai studi fenomenologi dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan pada implikasi teoritis dan praktis yakni sebagai berikut.

### 5.2.1 Implikasi Teoritis

- a. Analisis penelitian ini fokus pada konstruksi makna populisme politik dari sudut pandang partai yang memiliki spektrum ideologi politik yang berbeda.

Randiawan, 2023

**KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Adanya kajian dalam perspektif baru melihat fenomena populisme politik melalui lensa dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan yang dapat memberikan gambaran dari sudut pandang ilmiah.
- c. Dikembangkannya aplikasi teori dalam analisis populisme politik berdasarkan pada teori demokrasi dengan menerapkan analisis prinsip pada penyelenggaraan demokrasi melalui pemilihan umum yang masih bersifat elektoral sehingga populisme politik seringkali menjadi strategi dalam mencapai kemenangan partai politik.
- d. Dikembangkannya aplikasi teori dalam analisis populisme politik berdasarkan pada teori demokrasi dengan menerapkan analisis prinsip pada penyelenggaraan demokrasi melalui pemilihan umum yang masih bersifat elektoral sehingga populisme politik seringkali menjadi strategi dalam mencapai kemenangan partai politik.
- e. Dikembangkannya aplikasi teori dalam analisis populisme politik berdasarkan teori komunikasi politik melalui adanya relasi publik (public relation) dan mobilisasi massa dalam menggunakan komunikasi sebagai bangunan strategi populisme politik di masyarakat.
- f. Dikembangkannya aplikasi teori dalam populisme politik dijadikan sebagai strategi politik perlu memberikan orientasi pendekatan melalui teori elit dan struktural menggunakan kesempatan politik terlibat dalam proses demokrasi elektoral.
- g. Sebagai kritik ilmiah pada penelitian terdahulu yang memberikan analisis terhadap populisme politik sebagai hal yang mutlak negatif. Sehingga output dari penelitian ini menjadi konstruksi pemahaman dan sikap mengenai populisme politik sebagai suatu hal yang positif jika di arahkan pada sesuatu yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dengan di bangun melalui narasi dan pembuktian yang rasional.

### **5.2.2 Implikasi Praktis**

Pendidikan kewarganegaraan dalam memahami dan mengkritisi konsep populisme politik. Dapat memberikan pengetahuan tentang karakteristik, dampak, dan tantangan yang terkait dengan populisme politik. Hal ini dapat membantu

Randiawan, 2023

*KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

masyarakat dalam mengembangkan pemahaman yang kritis dan membangun sikap yang demokratis. Mengkaji strategi populistik yang digunakan oleh partai politik, serta mempromosikan kesadaran akan implikasi jangka panjang dari keputusan politik yang didasarkan pada populistik. Serta dapat mengevaluasi platform politik, yang tidak sesuai dengan tindakan partai politik.

Penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, melalui kampanye yang berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai populisme politik dan perannya dalam mempengaruhi sistem politik. Mendorong masyarakat untuk secara aktif mengkritisi populisme politik yang berdampak negatif. Sehingga implikasi praktis ini mengembangkan keterampilan kritis dan partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk menantang narasi populistik, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik, dan mempromosikan alternatif yang lebih inklusif dan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi.

### **5.3 Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini dideskripsikan dalam uraian sebagai berikut:

#### **a. Partai Politik**

1. Bagi partai politik, hendaknya membangun populisme politik yang positif kepada masyarakat, bukan hanya menjadikan populisme politik sebagai strategi belaka.
2. Partai politik perlu untuk membangun populisme politik yang positif tentunya melalui mengefektifkan pendidikan politik bagi kader partai. Partai politik menjadi aktor utama dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat melalui adanya dialog, diskusi, dan sosialisasi secara langsung.
3. Menggunakan narasi-narasi politik yang masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga hal ini menjadi bagian dari proses mewujudkan demokrasi yang baik.
4. Bagi Partai Politik perlu untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi baru dalam memandang dan memahami populisme politik.

**b. Politisi (Pelaku politik)**

1. Bagi pelaku politik, melakukan aktivitas politik yang sehat dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi pancasila di dalam pemilihan umum.
2. Perlu untuk menjadikan populisme sebagai strategi politik yang membangun, mengedukasi masyarakat dan terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kampanye-kampanye yang positif dan membangun. Bukan hanya menjadikan populisme sebagai strategi ‘omong kosong’ belaka.
3. Bagi pelaku politik perlu untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi baru dalam memandang dan memahami populisme politik.

**c. Akademisi Pendidikan kewarganegaraan**

1. Bagi civitas akademika Pendidikan kewarganegaraan, dapat mengoptimalkan peran keilmuan pendidikan kewarganegaraan melalui memberikan pemahaman kepada calon pendidik untuk dapat mengoptimalkan pendidikan politik dan memberikan analisis kritis.
2. Akademisi perlu untuk mengembangkan kajian mengenai populisme politik sesuai dengan sudut pandang pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai pancasila.

**d. Masyarakat Jawa Barat**

1. Bagi masyarakat, agar tidak mudah untuk terpolarisasi oleh para kelompok populis yang menjadikan populisme sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan belaka.
2. Masyarakat perlu kritis dan memahami informasi dan tindakan partai dan para politisi yang cenderung populistik dalam arti yang negatif.
3. Masyarakat agar tidak silau dengan tindakan populisme politik yang dilakukan oleh kelompok populis. Masyarakat perlu untuk mempertimbangkan kinerja, kualitas, dan kapabilitas dalam memilih calon pemimpin bukan hanya melihat popularitas belaka.

#### e. Pemerintah Jawa Barat

1. Bagi pemerintah provinsi Jawa Barat, perlu untuk memperhatikan polarisasi tindakan, fenomena, dan gejala populisme politik yang dilakukan oleh pelaku politik yang dapat memecah belah masyarakat Jawa Barat.
2. Pemerintah mesti menjadi bagian dalam memberikan edukasi dan pelayanan yang baik bagi masyarakat melalui program-program pemerintah.

#### f. Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan kajian penelitian dengan melakukan perbandingan penelitian mengenai makna populisme politik dalam konteks demokrasi.
2. Penelitian ini dapat direfleksikan secara kritis dan menjadi wahana pemahaman masyarakat dalam mendalami pemaknaan populisme politik di Indonesia agar tidak terpolarisasi pada narasi liar.

### 5.4 Dalil-dalil

1. Populisme politik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat elektabilitas partai politik.
2. Partai politik yang mampu menggabungkan isu-isu populis yang beragam memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan elektabilitasnya.
3. Persepsi masyarakat terhadap elit politik yang terhubung dengan populisme akan mempengaruhi cara mereka menilai elektabilitas partai.
4. Nilai-nilai kewarganegaraan yang diajarkan dalam pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana individu memahami dan mengartikan retorika populis, yang akan memengaruhi pandangan mereka terhadap populisme politik.
5. Pendidikan kewarganegaraan yang mendorong pemahaman kritis dapat membantu individu mengidentifikasi manipulasi retorika populis dan mengembangkan pandangan yang lebih matang.
6. Kesadaran politik yang dimiliki individu dapat mempengaruhi cara mereka mengkonstruksi makna populisme politik.
7. Pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk individu untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengartikan populisme politik dan menggunakan hak suara dengan bijak.

Randiawan, 2023

*KONSTRUKSI MAKNA POPULISME POLITIK DAN TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Fenomenologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)